

Deforestasi dalam Pelaporan Keberlanjutan: Scoping Review Bukti dari Indonesia

Alfitra Putri Deshanda ^{1*}

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

* 4213250013_alfitraputri@pknstan.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik pelaporan keberlanjutan terkait deforestasi di Indonesia guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Rangkaian banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025 membuat isu deforestasi kembali disorot, tidak hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga isu akuntabilitas publik karena menyangkut keputusan tata kelola lahan. Studi ini bertujuan untuk memetakan bukti (2020-2025) tentang bagaimana deforestasi/kehilangan hutan dibahas dalam sustainability reporting dan pelaporan non-keuangan lain di Indonesia, serta menemukan celah bukti yang menghambat komparabilitas dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah tinjauan pendahuluan berpedoman PRISMA-ScR. Pencarian dilakukan melalui Google Scholar menggunakan Publish or Perish dengan kueri yang telah ditetapkan, lalu dilakukan deduplikasi, penyaringan dua tahap (judul/abstrak dan full text), pemetaan kata kunci dengan VOSviewer, serta charting dalam tabel ekstraksi. Hasil menunjukkan hanya sedikit sumber yang lolos hingga tahap charting (n=2), dan deforestasi lebih sering muncul sebagai narasi tanggung jawab dibanding informasi yang spesifik dan mudah ditelusuri. Studi ini berkontribusi dengan peta bukti ringkas dan penekanan elemen minimum pengungkapan agar informasi deforestasi lebih berguna untuk pengawasan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Deforestasi, Pengungkapan Keberlanjutan, Pelaporan Non-Kuangan, Akuntabilitas Publik, Indonesia*

Pendahuluan

Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memunculkan pertanyaan yang sudah familiar di Indonesia: mengapa hujan lebat dapat berubah menjadi kerusakan ekstrem begitu cepat, terutama ketika bentang alam di hulu sudah tertekan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025). Di tingkat DAS, penelitian menunjukkan bahwa hilangnya hutan dan perubahan tutupan lahan dapat memperkuat dinamika banjir dan memperburuk dampak di hilir, sehingga curah hujan jarang menjadi satu-satunya penyebab (Ramadhan et al., 2023). Dalam praktiknya, hal itu membuat deforestasi lebih dari sekadar berita utama lingkungan, karena terkait dengan keputusan tentang izin, penegakan hukum, dan pengelolaan yang berada di dekat lembaga publik dan aktor yang terkait dengan negara (Adebayo & Ackers, 2025; Mawaddah & Zulkarnaini, 2025).

Pelaporan keberlanjutan telah berkembang di Indonesia selama bertahun-tahun, tetapi pengungkapan masih terasa tidak merata dan sulit dibandingkan antar organisasi, terutama ketika topik lingkungan dilaporkan lebih sebagai narasi daripada sinyal yang terukur (Gunawan et al., 2022; Lisdiono & Aditri, 2025). Ketika informasi tentang di mana kehilangan hutan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan tindakan apa yang diambil tetap tersebar, akuntabilitas menjadi kabur, meskipun risikonya nyata dan terlihat oleh publik (Adebayo &

Ackers, 2025). Inilah mengapa pengungkapan deforestasi bukanlah pelaporan tambahan, melainkan bagian dari bagaimana akuntabilitas publik dapat dilacak dan digunakan (De Jesus, 2024; Khoiriyah & Oktavilia, 2025).

Pengungkapan keberlanjutan dalam akuntansi sektor publik paling mudah dipahami menggunakan dua lensa: akuntabilitas publik, yang berarti publik berhak mengetahui apa yang dilakukan dan dicapai oleh aktor publik, dan legitimasi, yang berarti organisasi melakukan pengungkapan untuk menjaga kepercayaan dan persetujuan sosial (Adebayo & Ackers, 2025). Bukti berbasis Indonesia menunjukkan pelaporan keberlanjutan telah berkembang secara substansial sejak tahun-tahun awal adopsi melalui tekanan regulasi selanjutnya, tetapi konten lingkungan masih dapat tidak konsisten dan terkadang lebih mirip cerita daripada sinyal kinerja (Gunawan et al., 2022; Syahban et al., 2025).

Penelitian yang berfokus pada manajer juga mencatat bahwa lebih banyak pelaporan tidak secara otomatis berarti pelaporan yang lebih baik, karena kendala dalam sistem data, keterampilan, dan koordinasi dapat mendorong pengungkapan ke arah gaya kepatuhan daripada transparansi nyata (Suhardjo et al., 2025). Temuan spesifik topik memperkuat hal ini, misalnya, bukti pengungkapan air menunjukkan kepemilikan dan struktur tata kelola dapat berpengaruh, tetapi beberapa pendorong yang diasumsikan secara umum tidak selalu muncul secara konsisten dalam praktik (Wahyuningrum et al., 2023). Pada tingkat pemerintahan lokal, tinjauan literatur terstruktur menunjukkan bahwa pemerintah kota mengadopsi pelaporan keberlanjutan karena berbagai alasan, dan konteks sekitarnya dapat mempercepat atau memperlambat pengungkapan (Mol et al., 2025). Secara bersamaan, studi-studi ini menunjukkan bahwa lanskap pengungkapan semakin berkembang, tetapi kegunaannya dalam pengambilan keputusan untuk akuntabilitas lingkungan masih sangat bervariasi (Sesario & Faradina, 2025; Puspita et al., 2026).

Kesenjangan yang ada adalah bahwa penelitian sebelumnya sering membahas pelaporan keberlanjutan dalam istilah ESG atau SDG yang luas, tetapi jarang memeriksa apakah deforestasi diungkapkan dengan cara yang spesifik, dapat dibandingkan, dan dapat ditelusuri ke tanggung jawab dan tindakan (Gunawan et al., 2022; Adebayo & Ackers, 2025). Aliran penelitian lain dapat menjelaskan keterkaitan deforestasi dan banjir pada skala DAS, namun hal ini umumnya berada di luar percakapan tentang pengungkapan dan akuntansi sektor publik, sehingga cerita risiko dan cerita pelaporan tidak bertemu (Ramadhan et al., 2023; Purnami & Dewi, 2025). Akibatnya, basis bukti menjadi terfragmentasi: beberapa makalah berfokus pada kualitas pelaporan dan dinamika kepatuhan, yang lain pada faktor tata kelola, dan yang lain pada dampak lingkungan, tetapi semuanya tidak dipetakan bersama menjadi satu gambaran yang berfokus pada pengungkapan (Suhardjo et al., 2025; Mol et al., 2025).

Bukti yang masih kurang adalah peta tentang apa yang sebenarnya dilaporkan oleh studi-studi berbasis di Indonesia mengenai isi pengungkapan deforestasi, indikator yang digunakan, dan titik buta berulang yang membatasi perbandingan dan akuntabilitas (Adebayo & Ackers, 2025). Peta yang hilang ini penting karena keputusan pengungkapan membentuk apa yang menjadi terlihat, terukur, dan dapat diperdebatkan di ruang publik. Tinjauan cakupan ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan memetakan secara sistematis bukti-bukti di Indonesia tentang pengungkapan keberlanjutan terkait deforestasi (Sari et al., 2025; Rismawati et al., 2025).

Keunikan studi ini sederhana: studi ini memperlakukan pengungkapan deforestasi sebagai alat akuntabilitas dan memeriksa apakah kisah kehilangan hutan divisualisasikan secara konkret dan dapat dilacak, bukan hanya disebutkan sebagai topik ESG umum. Alih-alih

membaca laporan keberlanjutan sebagai daftar periksa, tinjauan ini mencari apakah pengungkapan menjelaskan pendorong, tanggung jawab, tindakan, lokasi, dan hasil dalam bahasa dan indikator yang benar-benar dapat diikuti oleh pengguna (Hikmah et al., 2026).

Studi ini juga tetap berfokus pada Indonesia agar selaras dengan realitas akuntabilitas dan tata kelola sektor publik, termasuk aktor yang terkait dengan negara di mana kebijakan, penegakan hukum, dan pengawasan seringkali beririsan dengan hasil penggunaan lahan. Secara metodologis, tinjauan cakupan (scoping review) cocok karena bukti tersebar di berbagai disiplin ilmu dan media, sehingga tujuannya adalah untuk memetakan apa yang ada dan apa yang hilang daripada menguji satu efek kausal tunggal. Hasilnya adalah peta bukti praktis yang menyoroti tema pengungkapan dominan, indikator yang paling sering digunakan, dan area di mana pengungkapan masih minim atau tidak jelas. Peta tersebut menjadi jembatan antara isu ini mendesak dan apa yang se

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan scoping review yang secara sistematis memetakan dan mensintesis berbagai praktik pelaporan keberlanjutan terkait deforestasi khusus dalam konteks Indonesia, sehingga mampu mengidentifikasi kesenjangan penelitian, variasi indikator pengungkapan, serta tren terbaru yang belum banyak dikaji secara terintegrasi. Penelitian ini juga menawarkan perspektif komprehensif yang menghubungkan aspek lingkungan, tata kelola, dan transparansi perusahaan dalam satu kerangka analisis yang lebih holistik. Benarnya ditunjukkan oleh literatur tentang pengungkapan oleh organisasi.

Studi ini merupakan tinjauan kualitatif dan mengadopsi paradigma interpretatif, yang berarti pengungkapan dibaca sebagai teks yang mencerminkan prioritas dan pilihan tentang apa yang organisasi buat terlihat dan terukur. Pertanyaan panduan menanyakan bagaimana deforestasi dan kehilangan hutan diungkapkan dalam pelaporan keberlanjutan atau pelaporan non-keuangan lainnya di Indonesia dan mengapa beberapa elemen pengungkapan menjadi rinci sementara yang lain tetap samar atau tidak ada.

Studi ini dilakukan untuk menguraikan tema pengungkapan dominan, indikator yang umum digunakan, dan kesenjangan bukti yang berulang yang membatasi perbandingan dan akuntabilitas. Mengikuti PRISMA-ScR, bukti diidentifikasi melalui pencarian terstruktur di *Google Scholar* menggunakan Publish or Perish, disaring dalam dua tahap (judul/abstrak dan teks lengkap), dan dipetakan dalam tabel ekstraksi standar. Sintesis menggunakan pemetaan bukti deskriptif dan sintesis tematik sehingga pola dan kesenjangan terlihat sekilas, dengan relevansi praktis bagi regulator/penyusun standar, lembaga publik dan entitas terkait negara, auditor/badan pengawas, dan masyarakat yang terdampak.

Pelaporan keberlanjutan dan ESG di Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya harapan akan transparansi non-keuangan dan pelembagaan praktik pelaporan keberlanjutan (Gunawan et al., 2022; Suhardjo et al., 2025). Bukti sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan pelaporan tidak merata di berbagai organisasi dan sering kali mencerminkan pergeseran tekanan regulasi dan pasar, yang dapat membuat pola pengungkapan tidak konsisten dari waktu ke waktu (Gunawan et al., 2022). Penelitian juga memperingatkan bahwa "lebih banyak pelaporan" tidak secara otomatis berarti "pelaporan yang lebih baik," karena kendala implementasi dapat mendorong pengungkapan ke arah narasi yang berorientasi pada kepatuhan daripada informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Suhardjo et al., 2025). Dalam konteks sektor publik dan yang terkait dengan negara, pengungkapan keberlanjutan umumnya diinterpretasikan melalui dua lensa yang saling berhubungan: akuntabilitas publik (pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggung jawab) dan

legitimasi (organisasi melakukan pengungkapan untuk menjaga kepercayaan dan persetujuan sosial) (Mol et al., 2025; Adebayo & Ackers, 2025).

Studi sektor publik menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan dapat berfungsi sebagai komunikasi kinerja dan pembangunan legitimasi, tergantung pada apa yang diungkapkan dan seberapa sistematis informasi tersebut diukur dan dilaporkan (Adebayo & Ackers, 2025; Achmad & Widoretno, 2025). Bukti dari konteks perusahaan milik negara juga menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan dibentuk oleh harapan kelembagaan dan tekanan perbandingan, yang menjadikan kualitas dan konsistensi pengungkapan sebagai hal yang penting bagi akuntabilitas (Wahyuningrum et al., 2023; Suhardjo et al., 2025).

Isu praktis utama adalah kualitas pengungkapan bergantung pada indikator apa yang digunakan dan apakah indikator tersebut dapat dibandingkan antar entitas dan waktu (Wahyuningrum et al., 2023; Gunawan et al., 2022). Penelitian pengungkapan berbasis di Indonesia menunjukkan bahwa struktur tata kelola dan kepemilikan dapat berpengaruh pada pola pengungkapan lingkungan, meskipun pendorongnya tidak selalu konsisten di berbagai studi (Wahyuningrum et al., 2023).

Hal ini penting untuk akuntabilitas yang berfokus pada deforestasi karena kehilangan hutan sering dibahas dalam narasi ESG yang luas, sementara bukti tentang bagaimana hal itu secara spesifik diungkapkan sebagai konten pelaporan yang terukur dan dapat dilacak dapat terfragmentasi (Suhardjo et al., 2025; Rahayu et al., 2025). Oleh karena itu, tinjauan cakupan (*scoping review*) tepat untuk memetakan apa yang sebenarnya dilaporkan oleh literatur tentang pengungkapan deforestasi/kehilangan hutan di Indonesia dan di mana kesenjangan bukti umum masih ada, menggunakan alur kerja yang transparan dan selaras dengan PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018).

Metode

Studi ini menerapkan metode *scoping review* untuk memetakan bagaimana isu deforestasi dan kehilangan hutan diintegrasikan dalam pelaporan keberlanjutan serta pelaporan non-keuangan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren, pola, dan fokus pengungkapan yang berkembang dalam literatur ilmiah. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip PRISMA-ScR dengan memastikan seluruh tahapan, mulai dari strategi pencarian hingga proses seleksi studi, terdokumentasi secara transparan dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui *Google Scholar* dengan memanfaatkan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) sebagai alat bantu pencarian dan ekspor data. Rentang waktu publikasi yang digunakan adalah tahun 2020–2025, dengan kombinasi kata kunci dalam bahasa Inggris dan Indonesia, seperti “*sustainability reporting*”, “*ESG*”, “*non-financial reporting*”, serta “*deforestation*”, “*forest loss*”, dan “*land use change*” dalam konteks Indonesia. Data yang diperoleh kemudian diekspor ke dalam *spreadsheet*, di mana proses pembersihan data dilakukan dengan menghapus duplikasi berdasarkan DOI atau judul. Selanjutnya, proses penyaringan dilakukan dalam dua tahap, yaitu penilaian judul dan abstrak pada tahap awal, serta penelaahan teks lengkap pada tahap lanjutan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Studi yang memenuhi kriteria kemudian dicatat dalam tabel ekstraksi data yang terstandar, mencakup informasi seperti detail publikasi, jenis penelitian, media pelaporan, fokus pengungkapan terkait deforestasi, indikator atau metrik yang digunakan, serta temuan utama masing-masing studi.

Data tersebut selanjutnya dianalisis melalui pemetaan bukti secara deskriptif dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dalam praktik pengungkapan serta kesenjangan yang masih berulang. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas perbandingan antar studi dan memperkuat akuntabilitas pelaporan keberlanjutan terkait deforestasi di Indonesia.

Tabel 1. Pedoman Tinjauan Lingkup (Sumber: Google Scholar)

Cakupan	Informasi Utama
2020–2025	Judul, penulis, tahun, penerbit
Bahasa: Inggris & Indonesia	Jenis studi (empiris/tinjauan) & metode
Akses: Teks lengkap tersedia	Jenis dokumen (laporan ESG, tahunan, dll.)
Fokus: Pengungkapan keberlanjutan/ESG	Pembahasan deforestasi/perubahan lahan
Konteks: Indonesia	Indikator atau metrik yang digunakan
Jenis studi: Jurnal terindeks (empiris & ulasan)	Temuan utama & kesenjangan penelitian

Tabel tersebut merangkum secara sistematis kriteria pemilihan dan analisis literatur yang berfokus pada isu keberlanjutan/ESG di Indonesia, dengan cakupan publikasi dalam rentang tahun 2020–2025. Sumber data utama berasal dari *Google Scholar* dengan mempertimbangkan artikel berbahasa Inggris maupun Indonesia yang tersedia dalam bentuk teks lengkap. Studi yang disertakan mencakup artikel jurnal terindeks, baik yang bersifat empiris maupun kajian literatur, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian di bidang ini. Informasi yang dianalisis meliputi data bibliografi, jenis penelitian, pendekatan metodologis, serta dokumen yang digunakan seperti laporan keberlanjutan atau laporan ESG.

Tabel ini juga menyoroti secara khusus bagaimana isu deforestasi dan perubahan penggunaan lahan dibahas dalam setiap studi, termasuk indikator atau metrik yang digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan dampaknya. Melalui analisis tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi temuan-temuan utama, tetapi juga mengungkap kesenjangan penelitian yang masih ada, seperti kurangnya standarisasi indikator dan keterbatasan komparabilitas antar studi. Dengan demikian, rangkuman ini menjadi dasar penting untuk memahami arah penelitian selanjutnya sekaligus memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

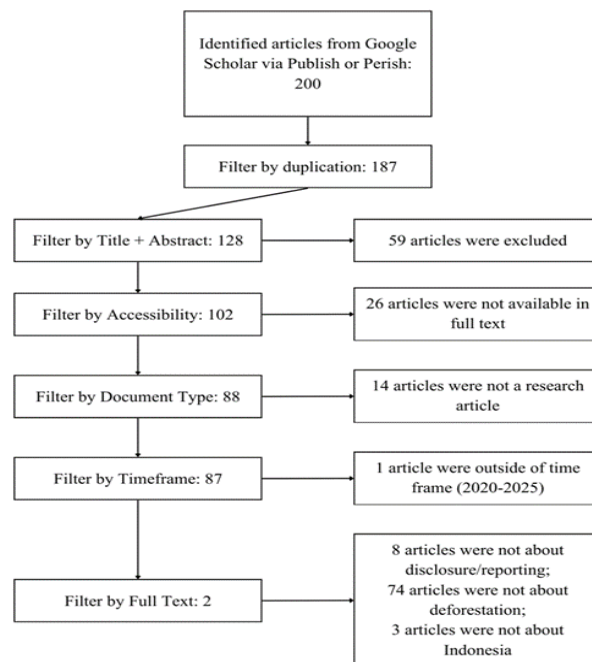
Hasil

Proses Seleksi Literatur

Proses identifikasi dan seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian mengambil 200 catatan dari *Google Scholar* melalui *Publish or Perish*. Setelah menghapus duplikat, tersisa 187 catatan. Penyaringan judul dan abstrak mempertahankan 128 catatan dan mengecualikan 59 yang jelas berada di luar cakupan. Dari 128 catatan tersebut, 26 teks lengkap tidak dapat diakses, sehingga 102 catatan dipindahkan ke tahap penyaringan teks lengkap. Setelah menerapkan kriteria teks lengkap, hanya 2 studi yang dimasukkan ke dalam set grafik akhir. Ini bukan kelemahan; ini adalah temuan: banyak makalah menyebutkan deforestasi, tetapi jauh lebih sedikit yang memperlakukannya sebagai topik pengungkapan/pelaporan dengan cara yang dapat digunakan untuk akuntabilitas.

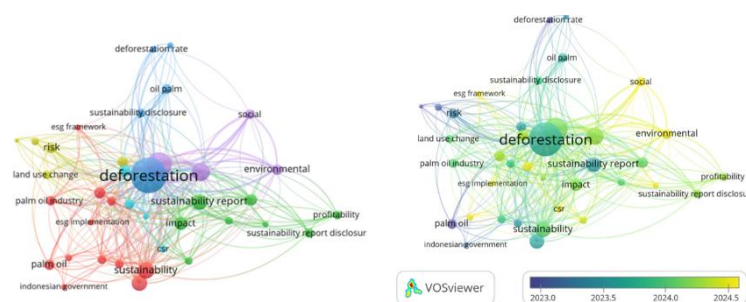
Pada Tahap 2, alasan pengecualian terbesar adalah “deforestasi/kehilangan hutan hanya disebutkan” ($n = 74$). Dengan kata lain, deforestasi sering muncul sebagai konteks latar belakang, bukan sebagai topik yang dilaporkan dengan indikator, target, lokasi, atau tanggung jawab yang dapat ditelusuri. Sebanyak 26 catatan lainnya dikecualikan karena teks lengkapnya

tidak dapat diakses, menunjukkan keterbatasan praktis ketika mengandalkan *Google Scholar* untuk pemetaan bukti.



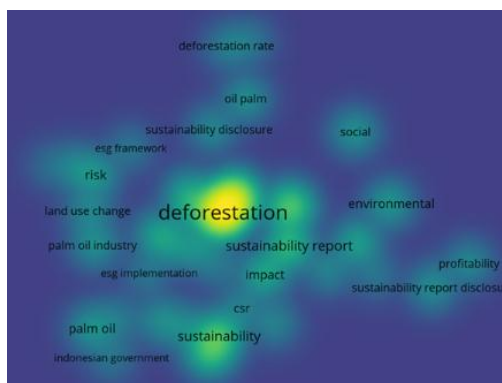
Gambar 1. Flowchart PRISMA Proses Seleksi Literatur

Kami juga mengecualikan 14 item karena bukan artikel penelitian (buku/ tesis/ laporan/ prosiding), ditambah pengecualian yang lebih kecil karena tidak membahas pengungkapan/ pelaporan (n = 8), tidak berfokus pada Indonesia (n = 3), dan berada di luar jendela 2020-2025 (n = 1). Secara keseluruhan, pola-pola ini menunjukkan “kesenjangan visibilitas” yang jelas: deforestasi banyak dibahas, tetapi bukti yang siap untuk pengungkapan jauh lebih sedikit.



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Dan Visualisasi Tumpah Tindih

Gambar 2 menunjukkan bahwa istilah-istilah dalam penelitian mengelompok ke dalam beberapa tema yang saling berkaitan, seperti kluster deforestasi dan pengungkapan keberlanjutan, industri minyak sawit, serta keterkaitannya dengan risiko dan perubahan penggunaan lahan yang juga terhubung dengan aspek lingkungan, sosial, dan profitabilitas, sehingga mencerminkan luasnya diskursus ESG/CSR dan pentingnya proses penyaringan untuk memfokuskan pada studi terkait pengungkapan deforestasi di Indonesia; sementara itu, Gambar 3 menampilkan dinamika waktu yang menunjukkan bahwa topik inti seperti deforestasi dan laporan keberlanjutan tetap relevan, dengan munculnya isu-isu baru seperti profitabilitas dan bentuk pengungkapan tertentu, yang mengindikasikan pergeseran perhatian dari sekadar isu deforestasi menjadi bagaimana hal tersebut dilaporkan, dikaitkan dengan risiko, serta digunakan untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan.



Gambar 3. Visualisasi Kepadatan

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan istilah mana yang paling sering muncul bersamaan. Titik terang paling menonjol berada pada "deforestasi", yang berarti istilah ini merupakan pusat utama dalam literatur yang ditemukan. Di sekitarnya, istilah-istilah yang terkait erat seperti "laporan keberlanjutan", "keberlanjutan", "dampak", "perubahan penggunaan lahan", dan "risiko" menunjukkan bahwa banyak makalah mengaitkan deforestasi dengan pelaporan keberlanjutan dan konsekuensinya, daripada memperlakukannya sebagai isu yang berdiri sendiri. Tahap akhir hanya memetakan dua sumber yang memenuhi syarat ke dalam tabel ekstraksi standar. Tabel ini adalah peta bukti inti dari tinjauan cakupan, karena menunjukkan apa yang sebenarnya dianalisis oleh setiap studi, bagaimana deforestasi/kehilangan hutan dibingkai dalam pelaporan, dan elemen atau indikator pengungkapan apa yang ada atau hilang di seluruh basis bukti. Tabel 2 menunjukkan bahwa kedua sumber yang disertakan memainkan peran yang berbeda dalam basis bukti.

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa tinjauan literatur yang membingkai deforestasi dan perubahan penggunaan lahan sebagai isu tata kelola hulu yang dapat memperkuat risiko banjir hilir, tetapi tidak mengoperasionalkan pengungkapan ke dalam elemen pelaporan yang sebanding (misalnya, metrik spesifik lokasi, target, atau jaminan) (Nusraningrum & Surjono, 2025). Sebaliknya, penelitian lainnya secara langsung memeriksa pelaporan keberlanjutan sebagai artefak pengungkapan dan menunjukkan bagaimana tanggung jawab lingkungan dapat dilakukan melalui narasi pelaporan, yang mungkin terlihat meyakinkan namun tetap sulit untuk diverifikasi ketika indikator terbatas atau disajikan secara tidak konsisten (Andajani & Riduwan, 2025). Jika diinterpretasikan bersama, hasil pemetaan menunjukkan pola yang berulang: deforestasi sering dibahas sebagai isu penting, tetapi literatur yang memperlakukan deforestasi sebagai objek pengungkapan yang dapat dilacak (dengan indikator yang sebanding dan hubungan tanggung jawab-tindakan-hasil yang jelas) masih terbatas.

Tabel 2. Hasil Pemetaan

Informasi Bibliografis	Jenis Studi	Dokumen Dianalisis	Cakupan Deforestasi	Indikator	Temuan & Kesenjangan
Nusraningrum & Surjono (2025)	Tinjauan literatur (naratif)	Literatur sekunder	Deforestasi sebagai faktor penyebab banjir dan risiko lingkungan	Konseptual (tanpa metrik spesifik)	Menjelaskan hubungan tata kelola–risiko, namun lemah pada aspek pengungkapan terukur. Gap: minim indikator akuntabilitas
Andajani & Riduwan (2025)	Kualitatif (analisis dokumen)	Laporan keberlanjutan	Deforestasi dibahas melalui narasi penggunaan lahan & rantai pasok	Naratif (tidak terstandarisasi)	Laporan sebagai media utama komunikasi, namun bervariasi. Gap: rendah keterbandingan & konsistensi indikator

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembahasan deforestasi dalam literatur dan laporan keberlanjutan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan naratif tanpa didukung indikator yang terstandarisasi, baik dalam studi tinjauan literatur maupun analisis dokumen. Meskipun telah mengaitkan deforestasi dengan risiko lingkungan, tata kelola, serta penggunaan lahan dan rantai pasok, pengungkapan yang ada masih lemah dalam aspek keterukuran, akuntabilitas, dan konsistensi, sehingga menimbulkan kesenjangan berupa rendahnya keterbandingan antar studi dan perlunya pengembangan indikator yang lebih sistematis

Pembahasan

Temuan-temuan ini sangat berkaitan dengan konsep-konsep dalam bagian tinjauan pustaka, terutama lensa akuntabilitas-legitimasi. Lensa akuntabilitas mengharapkan pengungkapan informasi dapat digunakan untuk evaluasi dan tindak lanjut, yang membutuhkan indikator yang sebanding dan konten yang dapat dilacak di berbagai entitas dan waktu (Wahyuningrum et al., 2023). Lensa legitimasi menjelaskan mengapa organisasi mungkin memprioritaskan koherensi naratif dan pembingkai positif untuk mempertahankan kepercayaan dan persetujuan sosial, bahkan ketika pengungkapan informasi tidak sepenuhnya terukur atau sebanding (Adebayo & Ackers, 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif teori legitimasi yang memandang bahwa praktik pelaporan tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menyajikan kinerja secara objektif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk citra dan mengelola persepsi publik terhadap organisasi (Andajani & Riduwan, 2025). Dalam kerangka ini, perusahaan cenderung menyusun narasi pelaporan yang selaras dengan ekspektasi sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat guna memperoleh penerimaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan tidak hanya berperan sebagai media komunikasi informasi, tetapi juga sebagai sarana legitimasi yang memperkuat posisi perusahaan di lingkungan sosial dan institusionalnya.

Pelaporan keberlanjutan sering kali menekankan aspek-aspek yang bersifat positif dan strategis, sementara informasi yang kurang menguntungkan atau sulit diukur cenderung disajikan secara terbatas atau bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelaporan dapat bergeser dari sekadar refleksi kinerja menjadi alat manajemen kesan (*impression management*), di mana perusahaan berupaya membangun persepsi tertentu tanpa selalu didukung oleh indikator yang terstandarisasi dan terukur. Akibatnya, meskipun pelaporan tersebut mampu meningkatkan legitimasi di mata pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menggambarkan kinerja lingkungan secara komprehensif dan dapat dibandingkan.

Sejumlah penelitian turut menegaskan bahwa isu deforestasi telah menjadi bagian penting dalam diskursus akuntabilitas publik, terutama karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan sosial. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, di mana pembahasan mengenai tata kelola belum secara konsisten diterjemahkan ke dalam bentuk pengungkapan yang terstandarisasi dan dapat dibandingkan. Akibatnya, informasi yang tersedia sering kali kurang mendukung kebutuhan analisis yang komprehensif serta pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga diperlukan upaya untuk menjembatani aspek konseptual tata kelola dengan praktik pelaporan yang lebih terstruktur dan informatif. (Nusrainingrum & Surjono, 2025).

Tinjauan cakupan ini secara keseluruhan menjawab tujuannya dengan memetakan apa yang ditekankan oleh bukti-bukti yang tersedia di Indonesia dan apa yang masih kurang dikembangkan. Sumber-sumber yang disertakan menunjukkan bahwa diskusi saat ini lebih kuat dalam menjelaskan mengapa deforestasi itu penting daripada dalam menentukan bagaimana deforestasi harus diungkapkan secara terukur dan dapat dibandingkan. Hal ini secara langsung mendukung kekhawatiran yang diangkat dalam tinjauan literatur bahwa lebih banyak pelaporan tidak selalu berarti pelaporan yang lebih baik, terutama ketika pengungkapan masih sarat dengan narasi dan tidak didasarkan pada indikator yang konsisten (Suhardjo et al., 2025).

Tabel dan grafik tersebut secara jelas mengilustrasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam praktik pelaporan deforestasi di Indonesia, khususnya terkait kualitas pengungkapan informasi dan keterbandingan antar laporan. Meskipun berbagai organisasi telah menyajikan informasi mengenai isu deforestasi, perbedaan dalam format, indikator, serta tingkat kedalaman pelaporan menyebabkan data yang dihasilkan sulit untuk dibandingkan secara konsisten. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang kuat, karena pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang seragam, terukur, dan dapat diandalkan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan keputusan.

Keterbatasan utama dalam tinjauan pendahuluan ini terletak pada ruang lingkupnya yang hanya memetakan bukti yang dapat ditemukan dan diakses berdasarkan protokol pencarian yang telah ditetapkan, sehingga belum merepresentasikan keseluruhan literatur di Indonesia terkait pengungkapan deforestasi. Dengan kata lain, hasil kajian ini lebih mencerminkan ketersediaan data yang terjangkau daripada gambaran menyeluruh kondisi penelitian yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan adanya studi relevan yang tidak terjangkau dalam proses pencarian, sehingga cakupan analisis menjadi terbatas.

Proses pencarian data yang hanya mengandalkan *Google Scholar* melalui bantuan *Publish or Perish*, dengan penggunaan satu kueri utama, batasan tahun publikasi 2020–2025, serta syarat ketersediaan teks lengkap, berpotensi mempersempit jumlah studi yang teridentifikasi. Kondisi ini berkontribusi pada ukuran sampel literatur yang relatif kecil, sehingga membatasi kedalaman dan keluasan analisis yang dapat dilakukan. Implikasinya, temuan dalam tinjauan ini lebih kuat dalam mengungkap pola umum serta kesenjangan penelitian yang berulang, namun belum cukup representatif untuk menarik generalisasi yang luas lintas sektor, industri, maupun aktor yang terlibat dalam konteks nasional.

Hal ini tetap informatif untuk diskusi: hal ini menunjukkan bahwa deforestasi banyak disebutkan dalam percakapan tentang keberlanjutan dan ESG, tetapi bukti yang siap diungkapkan yang spesifik, dapat dibandingkan, dan dapat dilacak masih terbatas. Secara praktis, pekerjaan di masa mendatang harus memperluas strategi pencarian (kueri dan/atau basis data yang ditargetkan tambahan) dan menerapkan kerangka kerja pengungkapan minimum yang sederhana saat melakukan penyaringan dan pembuatan grafik, seperti mensyaratkan kejelasan tentang di mana kehilangan hutan terjadi, indikator/metrik apa yang dilaporkan, tindakan apa yang diambil, dan hasil terukur apa yang mengikutinya, sehingga akuntabilitas menjadi lebih mudah untuk diikuti dan dibandingkan antar organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan bukti yang dipetakan, dua sumber yang disertakan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa deforestasi hadir dalam percakapan tentang keberlanjutan, tetapi tidak secara konsisten diterjemahkan ke dalam konten pengungkapan yang mudah dilacak,

dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan di berbagai entitas (Nusraningrum & Surjono, 2025; Andajani & Riduwan, 2025). Secara praktis, deforestasi cenderung muncul sebagai bagian dari narasi keberlanjutan atau ESG yang lebih luas, sementara elemen pengungkapan konkret (tanggung jawab yang jelas, spesifikasi lokasi, jangka waktu, dan indikator yang terukur) tidak merata atau terbatas. Hal ini mendukung kesimpulan utama dari tinjauan pendahuluan: kesenjangan utamanya bukanlah tidak adanya diskusi, tetapi kesenjangan visibilitas dan perbandingan dalam bagaimana kehilangan hutan diubah menjadi pelaporan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Tinjauan ini terbatas karena ketergantungannya pada *Google Scholar* (melalui *Publish or Perish*), akses teks lengkap yang ketat, dan rentang waktu yang sempit (2020-2025), yang berkontribusi pada kumpulan bukti akhir yang sangat kecil. Penelitian di masa mendatang dapat memperkuat peta dengan memperluas basis data (misalnya, Scopus/WoS), menyempurnakan kata kunci pengungkapan khusus Indonesia (misalnya, konversi hutan, pembukaan lahan, rantai pasokan minyak sawit, ketertelusuran), dan secara eksplisit mengoperasionalkan "kualitas pengungkapan deforestasi" menggunakan indikator yang sebanding. Secara praktis, regulator dan entitas pelapor dapat meningkatkan akuntabilitas dengan memprioritaskan elemen pengungkapan minimum yang konsisten untuk deforestasi (di mana terjadi, mengapa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, tindakan/target apa yang ada, dan metrik apa yang dilaporkan), sehingga pelaporan keberlanjutan menjadi lebih dari sekadar narasi dan lebih bermanfaat untuk pengawasan dan evaluasi publik.

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya standar pengungkapan deforestasi yang terukur dan komparabel dalam pelaporan keberlanjutan. Keterbatasannya terletak pada cakupan data terbatas dan metode scoping review. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sumber data, menggunakan pendekatan empiris lintas sektor, serta mengembangkan indikator kuantitatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Achmad, F. S. P., & Widoretno, A. A. (2025). Sustainability disclosure, governance, and financial performance in determining firm value. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i4.42744>
- Adebayo, A., & Ackers, B. (2025). Comparative sustainability disclosure in state-owned enterprises: insights from Oceania countries. *Pacific Accounting Review*. <https://doi.org/10.1108/PAR-12-2024-0340>
- Andajani, A., & Riduwan, A. (2025). The dramaturgy of sustainability reporting: Environmental and humanitarian responsibility context. *Journal of Accounting and Investment*, 26(3), 1059–1084. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i3.28009>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025, November 30). Kepala BNPB: Korban meninggal dunia atas bencana hidrometeorologi Aceh, Sumut dan Sumbar jadi 303 jiwa. Website Badan Penanggulangan Bencana.

- de Jesus, L. F. F. (2024). Indonesia's current and future efforts to tackle the issue of deforestation. *Journal of Social and Government Studies*, 2(2).
<https://doi.org/10.36080/jsgs.v2i2.39>
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Fauzi, H. (2022). The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 358, 131798.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798>
- Hikmah, M. N., Mahdani, R., & Syafrizal, S. (2026). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya). *Journal Social Society*, 6(2), 915–927.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1145>
- Khoiriyannah, U., & Oktavilia, S. (2025). A longitudinal study on deforestation trends in Indonesia from 1996 to 2022. *Review of Human Sciences*, 5(3).
<https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.564>
- Lisdiono, P., & Aditri, U. F. (2025). An analysis of the impact of mandatory sustainability reporting disclosure on firm value in public energy sector companies. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(8). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p08>
- Mawaddah, M., & Zulkarnaini, Z. (2025). Evaluasi kebijakan pengendalian deforestasi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3). <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1007>
- Mol, A., van Schie, V., & Budding, T. (2025). Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review. *Financial Accountability & Management*, 41(1), 200–229. <https://doi.org/10.1111/faam.12407>
- Nusraningrum, D., & Surjono, S. (2025). *Environmental Governance, Deforestation, and Flood Risk: A Literature Review on Sustainable Strategic Management after the 2025 Sumatra Floods*.
- Purnami, K. S., & Dewi, L. G. K. (2025). Sustainability disclosures, environmental investments, and corporate valuation: Examining the interplay between performance and perception. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(12). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i12.p02>
- Puspita, A. D., Solihat, S. T., & Anna, Y. D. (2026). Studi Empiris: Analisis Penerapan Sustainability Reporting di Negara-Negara Asia. *Journal Social Society*, 6(1), 747–760.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1073>
- Rahayu, A. D., Hayati, M., & Selvina, M. (2025). The effect of ESG disclosure on the cost of capital with sharia compliance as a moderating variable. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v11i1.27560>
- Ramadhan, C., Dina, R., & Nurjani, E. (2023). Spatial and temporal based deforestation proclivity analysis on flood events with applying watershed scale (case study: Lasolo watershed in Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, and South Sulawesi, Indonesia). *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 93, 103745.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103745>
- Rismawati, R., Duriani, D., & Aqsa, M. (2025). ESG disclosure, firm value, and investment decisions: Evidence from Indonesia's capital market. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(12).
<https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i12.p12>

- Sari, D. P., Fikri, M., Kartika, R., & Tanwattana, N. (2025). Corporate governance, ESG disclosure, and firm value: Evidence from public companies in Indonesia. *Journal of Economics and Management*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.70716/ecoma.v3i2.235>
- Sesario, R., & Faradina, A. (2025). Deforestation and the development dilemma: Challenges of forest governance in Indonesia. *Journal of Horizon*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.62872/2h1z5273>
- Suhardjo, I., Akroyd, C., & Suparman, M. (2025). Beyond compliance: sustainability reporting challenges and the future of integrated reporting in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 1–19. <https://doi.org/10.1108/ARA-06-2024-0190>
- Syahban, W., Marzuki, S. N., & Buhasyim, M. A. (2025). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. *Journal Social Society*, 5(1), 28–45. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.625>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): *Checklist and Explanation*. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Wahyuningrum, I. F. S., Chegenizadeh, A., Hajawiyah, A., Sriningsih, S., Utami, S., Budihardjo, M. A., & Nikraz, H. (2023). Determinants of Corporate Water Disclosure in Indonesia. *Sustainability*, 15(14), 11107. <https://doi.org/10.3390/su151411107>